

ABILITY TO PAY DAN WILLINGNESS TO PAY PESERTA MANDIRI TERHADAP PENENTUAN KELAS IURAN JKN DI KABUPATEN BEKASI

Eka Darmawati¹, Anom Dwi Prakoso²

Program Studi Administrasi Kesehatan, Universitas Medika Suherman, Indonesia

Email: anomdwiprakoso@gmail.com

Received: 2-11-2022; Revised: 21-12-2022.; Accepted: 21-12-2022

Abstract

The National Health Insurance (JKN) is a social health insurance program that aims to enable all people to experience affordable, quality and equitable health services, including for independent participants who work in the non-formal sector. Since the Covid-19 pandemic, the contribution of independent participants in paying JKN contributions has decreased significantly because many are in arrears. A decrease in one's income will determine one's compliance, ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) in paying JKN contributions on a regular basis. The purpose of this study is to analyze the relationship between ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) with the determination of the JKN Contribution Class. This type of research is quantitative research using a cross sectional study method. The research was conducted in Bekasi Regency, West Java in June-August 2022. The research subjects consisted of 66 independent participants using a purposive sampling technique of 66 samples. Data analysis used the Spearman rank test. The results showed that the JKN contribution class was related to ability to pay ($p\text{-value}=0.000$; $r=0.522$) and willingness to pay ($p\text{-value}=0.000$; $r=0.751$). The conclusion is that there is a moderate relationship between the ability to pay and a strong relationship between the willingness to pay and the determination of the JKN contribution class.

Keywords: health insurance, independent participants, ability to pay, willingness to pay

Abstrak

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program asuransi kesehatan sosial yang bertujuan agar semua masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu, dan berkeadilan termasuk bagi peserta mandiri yang berkerja pada sektor nonformal. Semenjak pandemi Covid-19, kontribusi peserta mandiri dalam membayar iuran JKN menurun signifikan karena banyak yang menunggak iuran. Menurunnya pendapatan seseorang akan menentukan kepatuhan, *ability to pay* (ATP) dan *willingness to pay* (WTP) seseorang dalam membayar iuran JKN secara rutin. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis hubungan antara *ability to pay* (ATP) dan *willingness to pay* (WTP) dengan penentuan Kelas Iuran JKN. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *cross sectional study*. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada bulan Juni-Agustus 2022. Subjek penelitian terdiri dari 66 peserta mandiri menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* sebanyak 66 sampel. Analisis data menggunakan uji *spearman rank*. Hasil penelitian menunjukkan kelas iuran JKN berhubungan dengan *ability to pay* ($p\text{-value}=0,000$; $r=0,522$) dan *willingness to pay* ($p\text{-value}=0,000$; $r=0,751$). Kesimpulannya yaitu terdapat hubungan yang sedang antara kemampuan membayar dan hubungan yang kuat kemauan membayar dengan penentuan kelas iuran JKN.

Kata kunci : jaminan kesehatan, peserta mandiri, *ability to pay*, *willingnes to pay*

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dimana sebagai kondisi yang diperlukan agar terpenuhinya hak-hak lainnya dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan (Ardinata, 2020). UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur (Kemenkes, 2016). Jaminan Kesehatan merupakan kepastian perlindungan kesehatan bagi setiap orang yang wajib disediakan oleh Pemerintah melalui SJSN. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian SJSN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). JKN diharapkan mampu menjadi tulang punggung dalam pencapaian UHC di Indonesia (Prakoso et al., 2020).

JKN adalah program jaminan sosial yang merupakan program pemerintah yang menjamin biaya kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan pemerintah secara nasional dengan gotong royong yang mewajibkan seluruh penduduk Indonesia untuk membayar premi secara berkala setiap bulannya atau dibayarkan oleh pemerintah kepada BPJS kesehatan. Upaya ini untuk mendorong agar masyarakat berprastisipasi dalam rangka mencapai universal health coverage (UHC) artinya seluruh Warga Negara Indonesia ataupun orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, maka penting bagi semua sektor untuk turut mendukung dan berpartisipasi dalam melakukan upaya agar terdaftar sebagai peserta JKN dengan bukti kepemilikan kartu JKN (Kurniawati and Rachmayanti, 2018).

Kemampuan membayar (ATP) dan kemauan membayar (WTP) adalah dua faktor yang berperan dalam penggunaan manfaat klinis yang juga akan mempengaruhi nilai

Pembiayaan kesehatan yang adil dan merata dimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya dan membayar pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan membayarnya. Masalah pembayaran iuran yang adil tetap belum terselesaikan karena gagasan kebutuhan yang meragukan. Pasien perlu membayar iuran adalah antara mampu membayar dan apa yang umumnya diharapkan. Keterbatasan finansial membuat orang-orang tertentu memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar layanan kesehatan yang mereka dapatkan dengan premi yang telah ditetapkan (Syakhila, 2021).

Biaya kesehatan dan resiko sakit yang semakin tinggi bagi masyarakat menjadi alasan pentingnya seseorang mengikuti program JKN dan membayar iuran wajib setiap bulannya. Masyarakat berhak memilih kelas iuran JKN sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Kelas 1 yaitu Rp150,000 per orang per bulan, kelas 2 yaitu Rp100,000 per orang per bulan dan kelas 3 yaitu Rp35,000 per org per bulan (Prakoso, 2021).

Peserta mandiri Peserta mandiri yaitu seseorang yang mendapatkan penghasilan dari usaha yang dilakukan sendiri dan melakukan kewajiban pembayaran iuran setiap bulannya sebagai peserta JKN. Peserta mandiri seing dikenal dengan Pekerja Penerima Upah atau Pekerja Informal yang pada umumnya bekerja pada sektor non formal. Pendapatan pekerja yang tidak menentu tiap bulannya mengakibatkan kurangnya minat dan kesadaran mereka menjadi peserta JKN (Siswoyo et al., 2015). Kurangnya minat dan kesadaran peserta mandiri untuk mengikuti JKN dan mau membayar iuran dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemampuan membayar dan kemauan membayar masing-masing seseorang menjadi salah satu diantaranya. Kemampuan membayar sangat ditentukan oleh pendapatan seseorang. Seseorang mempunyai pendapatan yang semakin meningkat tentunya kemampuan membayar iuran kesehatan semakin besar (Hildayanti et al., 2021).

Laporan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menunjukkan angka peserta BPJS mandiri (PBPJ) yang menunggak iuran (peserta tidak aktif) di Kabupaten Bekasi per bulan Mei tahun 2022 mencapai 222.864 jiwa (52.1%). Artinya lebih dari setengah dari total PBPJ yang menjadi peserta BPJS Kesehatan berstatus menunggak iuran (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2020).

Menurut data SIPP (Saluran Informasi Penanganan Pengaduan) pada tahun 2021-2022 di RS Sentra Medika mengalami peningkatan mencapai jumlah 606 peserta BPJS mandiri (PBPJ) yang menunggak iuran dari jumlah 96.698 peserta (SIPP, 2022).

Kemampuan membayar (ATP) Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar pada tahun 2020 berada pada klasifikasi kompeten 74,5% kategori mampu. Kemauan membayar (WTP) di Puskesmas Cendrawasih Kota Makassar tahun 2020 sebesar 61,2% bersedia kategori mau. Perlunya mengkaji ulang dalam mempertimbangkan tarif iuran BPJS yang berdasarkan kemampuan membayar dan kemauan membayar masyarakat (Baso dkk, 2021).

Dari data dan permasalahan tersebut, tunggakan iuran menjadi salah satu permasalahan pada aspek kepesertaan JKN. Pandemi Covid-19 terbukti berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat, khususnya bagi peserta mandiri BPJS yang umumnya bekerja pada sektor informal. Hal tersebut berimbas terhadap ketidakmampuan membayar iuran, kemauan membayar iuran secara rutin.

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis hubungan antara *ability to pay* dan *willingness to pay* dengan penentuan kelas iuran JKN.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan desain *cross sectional* dan pendekatan analitik observasional. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta mandiri yang berobat rawan jalan di RS Sentra Medika Cikarang.

Sampel yang diteliti sejumlah 66 subjek penelitian yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Juni-Agustus Tahun 2022. Kriteria inklusi dan kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu pasien BPJS Kesehatan Mandiri (PBPJ) yang sedang dalam pengobatan rawat jalan dan bersedia menjadi responden. Instrumen penelitian menggunakan lembar kuesioner dan *check list*. Variabel dalam penelitian ini yaitu *ability to pay* dan *willingness to pay* (variabel bebas) dan penentuan kelas iuran JKN (variabel terikat). Alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner melalui *google form*. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik univariat dan bivariat. Analisis univariat didiskripsikan dalam *n* dan *%*. Analisis bivariat menggunakan uji korelasi *spearman rank* yang ditampilkan dalam nilai probabilitas (*p-value* / nilai sig)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Tabel 1. Distribusi karakteristik responden

Karakteristik	Kategori	n	%
Umur	<42 tahun	35	53.0
	≥ 42 tahun	31	47.0
Jenis Kelamin	Laki-laki	22	33.3
	Perempuan	44	66.7
Pendapatan Keluarga	<Rp 4,791,843	20	30.3
	≥ Rp 4,791,843	46	69.7
Jumlah Anggota Keluarga	< 4 orang	36	54.5
	≥ 4 orang	30	45.5

Berdasarkan tabel 1 tentang distribusi karakteristik responden menunjukkan bahwa subjek penelitian berumur <42 tahun sebanyak 35 pasien (53.0%). Sedangkan pasien berumur >42 tahun sebanyak 31 orang (47.0%).

Mayoritas subjek penelitian berjenis kelamin perempuan sebanyak 44 orang (66.7%). Sedangkan sebagian lagi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang (33.3%). Sebagian besar subjek penelitian memiliki jumlah anggota keluarga <4 sebanyak 36 orang (54.5%). Sedangkan sebagian lainnya memiliki jumlah anggota keluarga ≥ 4 sebanyak 30 orang (45.5%). Mayoritas subjek penelitian berpendapatan $\geq$ Rp4,791,843 sebanyak 46 orang (69.7%). Sedangkan sebagian lainnya berpendapatan < Rp4,791,843 sebanyak 20 orang (30.3%).

Pengkategorian umur berdasarkan rata-rata (*mean*) umur subjek penelitian yaitu 42 tahun. Sedangkan pengkategorian jenis kelamin berdasarkan perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologis manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Pengkategorian pendapatan berdasarkan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2022 yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu 4,791,843. Pengkategorian jumlah anggota keluarga berdasarkan rata-rata (*mean*) jumlah anggota yang ditanggung oleh responden untuk membayar iuran JKN yaitu 4 orang.

Tabel 2. Distribusi frekuensi variabel (kategorik)

Variabel	Kategori	n	%
Penentuan Kelas Iuran JKN	Kelas I	13	19.7
	Kelas II	14	21.2
	Kelas III	39	59.2
Ability To Pay	<Rp35,000	32	48.5
	$\geq$ Rp35,000	34	51.5
Willingness To Pay	<Rp35,000	37	56.1
	$\geq$ Rp35,000	29	43.9

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa mayoritas subjek penelitian memilih kelas III sejumlah 39 orang, kelas II sejumlah 14 orang (21.2%) dan kelas I sejumlah 13 orang (19.7%). Pengkategorian variabel penentuan kelas iuran berdasarkan besaran

iuran yang harus dibayarkan peserta per bulannya yaitu kelas 1 sejumlah Rp150,000 per orang per bulan, kelas 2 sejumlah Rp100,000 per orang per bulan dan kelas 3 sejumlah Rp35,000 per orang per bulan.

Penentuan *ability to pay* (kemampuan membayar) responden melalui rasio (pendapatan -pengeluaran esensial x 5%). Pendapatan dalam hal ini yaitu pendapatan keluarga meliputi total pendapatan suami ditambah dengan pendapatan istri. Sedangkan pengeluaran esensial berupa kebutuhan pokok yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi variabel kemampuan membayar diketahui bahwa subjek penelitian yang mampu membayar <Rp35,000 lebih sedikit yaitu 32 orang (48.5%) dibandingkan dengan subjek penelitian yang mampu membayar $\geq$ Rp35,000 yaitu 34 orang (51.5%). Pengkategorian variabel kemampuan membayar berdasarkan kemampuan subjek penelitian untuk membayar iuran JKN sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait tarif iuran JKN yaitu paling rendah Rp35,000. Peserta dianggap tidak mampu jika *ability to pay* subjek penelitian <Rp35,000. Sedangkan peserta dianggap mampu jika *ability to pay* subjek penelitian $\geq$ Rp35,000.

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi variabel kemauan membayar diketahui bahwa subjek penelitian yang mau membayar <Rp35,000 lebih banyak yaitu 37 orang (56.1%) dibandingkan dengan subjek penelitian yang mampu membayar $\geq$ 35,000 yaitu 29 orang (43.9%). Pengkategorian variabel kemauan membayar berdasarkan kemampuan subjek penelitian untuk membayar iuran JKN sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait tarif iuran JKN yaitu paling rendah Rp35,000. Peserta dianggap tidak mau jika *willingness to pay* subjek penelitian <Rp35,000. Sedangkan peserta dianggap mau jika *willingness to pay* subjek penelitian $\geq$ Rp35,000.

Tabel 3. Analisis hubungan kemampuan membayar pada penentuan kelas iuran JKN.

<i>Ability to pay</i>	Penentuan Kelas Iuran JKN					Korelasi
	Kelas 1	Kelas2	Kelas 3	Total	<i>p-value</i>	
<Rp35,000	1	5	26	32	0.000	0.522
≥Rp35,000	12	9	13	34		
Jumlah	13	14	39	66		

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat hubungan kemampuan membayar dengan penentuan kelas iuran JKN. Hasil analisis statistik menggunakan uji spearman rank menunjukkan bahwa nilai *p-value* sebesar 0,000 atau <0,05 dengan nilai korelasi 0,522 yang bermakna bahwa ada hubungan yang sedang antara kemampuan membayar dengan penentuan kelas iuran JKN.

Diketahui bahwa dari total 66 subjek penelitian yang mampu membayar <35.000 dan memutuskan memilih kelas 1 sebanyak 1 orang, kelas 2 sebanyak 5 orang, kelas 3 sebanyak 26 orang. Sedangkan subjek penelitian yang mampu membayar ≥35.000 dan memutuskan memilih kelas 1 sebanyak 12 orang, kelas 2 sebanyak 9 orang, kelas 3 sebanyak 13 orang.

Tabel 3. Analisis hubungan kemauan membayar pada penentuan kelas iuran JKN

<i>Willingness to pay</i>	Penentuan Kelas Iuran JKN					Korelasi
	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Total	<i>p-value</i>	
< 35.000	1	2	34	37	0,000	0,751
≥ 35.000	12	12	5	34		
Jumlah	13	14	39	66		

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kemauan membayar dengan penentuan kelas iuran JKN. Hasil analisis statistik menggunakan uji *spearman rank* menunjukkan bahwa nilai *p value* sebesar 0,000 atau < 0,05 dengan nilai korelasi 0,751 yang bermakna bahwa ada hubungan yang tinggi antara kemauan membayar pada penentuan kelas iuran JKN di RS Sentra Medika Cikarang.

Diketahui bahwa dari total 66 subjek penelitian yang mau membayar <35.000 dan memutuskan memilih kelas 1 sebanyak 1 orang, kelas 2 sebanyak 2 orang, kelas 3 sebanyak 34 orang. Sedangkan subjek penelitian yang mampu membayar ≥35.000 dan memutuskan memilih kelas 1 sebanyak 12 orang, kelas 2 sebanyak 12 orang, kelas 3 sebanyak 5 orang

2. Pembahasan

a. Hubungan antara *ability to pay* dengan penentuan kelas iuran JKN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *ability to pay* menunjukkan hubungan yang signifikan dengan penentuan kelas iuran pada peserta mandiri JKN. Peserta mandiri JKN dengan *ability to pay* ≥Rp35.000 relatif lebih banyak memilih kelas I dan II. Sedangkan Peserta mandiri JKN dengan *ability*

to pay <Rp35.000 cenderung lebih banyak memilih kelas III. Analisis statistik menggunakan uji spearman rank menunjukkan bahwa nilai *p-value* sebesar 0,000 atau <0,05 dengan nilai korelasi 0,522 yang bermakna bahwa ada hubungan yang sedang antara *ability to pay* dengan penentuan kelas iuran JKN.

Ability to Pay (kemampuan membayar) Iuran JKN merupakan sebuah kemampuan

seseorang dalam membayar premi/ iuran JKN secara rutin tiap bulannya bulannya sejumlah Rp150,000 untuk kelas 1 atau Rp100,000 untuk kelas 2 dan Rp35,000 untuk kelas 3 sesuai dengan manfaat perawatan yang dipilih (Yandrizal et al., 2017). *Ability to pay* seseorang sangat ditentukan oleh pendapatannya. Studi pada pekerja sektor informal khususnya pedagang pasar tradisional di Kota Denpasar tahun 2017 menunjukkan bahwa mayoritas pedagang pasar disana yang tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) rata-rata hanya mampu membayar di kelas 3 (Dedy et al., 2019).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Noerjoedianto, (2016) menunjukkan terdapat hubungan antara antara tingkat pendapatan terhadap dalam pemilihan seseorang terkait besaran iuran BPJS hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji statistik bahwa nilai *p value* sebesar 0,000. Kemampuan ATP sebesar Rp25.235 meningkatkan kemungkinan seseorang untuk memilih iuran yang paling mendekati besaran ATP seseorang.

Menurut Muttaqien et al., (2021) menyatakan bahwa peningkatan pada pendapatan yang meningkatkan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*), dengan kemampuan ini akan mengendalikan seseorang untuk menghadapi risiko biaya medis ketika sakit, sehingga menjadi mau akan semakin besar kemampuannya untuk membayar biaya pelayanan kesehatan termasuk iuran asuransi kesehatan.

Sejalan dengan Nur et al., (2018) yang menyatakan bahwa kemampuan materiil seseorang sangat menentukan pemilihan kelas kepesertaan JKN. Pendapatan pekerja di sektor informal yang tidak menentu tiap bulannya mengakibatkan banyak diantara mereka yang akhirnya memilih kelas kepesertaan yang paling rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah 85 dari 90 pekerja informal yang memiliki pendapatan kecil cenderung memilih kelas 3 kepesertaan JKN.

Kesehatan sangat bergantung pada kemampuan materiil seseorang. Pendapatan

seseorang sangat menentukan kemampuan membayar iuran JKN, yang mana hal tersebut akan menentukan keputusan seseorang terhadap pemilihan iuran JKN sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Semakin tinggi *ability to pay* seseorang akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk memilih kelas iuran yang lebih tinggi untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang sesuai dengan pendapatannya.

b. Hubungan antara *willingness to pay* dengan penentuan kelas iuran JKN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *willingness to pay* menunjukkan hubungan yang signifikan dengan penentuan kelas iuran pada peserta mandiri JKN. Peserta mandiri JKN dengan *willingness to pay* $\geq$ Rp35.000 relatif lebih banyak memilih kelas I dan II. Sedangkan Peserta mandiri JKN dengan *willingness to pay* $<$ Rp35.000 cenderung lebih banyak memilih kelas III. Analisis statistik menggunakan uji *spearman rank* menunjukkan bahwa nilai *p value* sebesar 0,000 atau $<$ 0,05 dengan nilai korelasi 0,751 yang bermakna bahwa ada hubungan yang tinggi antara *willingness to pay* pada penentuan kelas iuran JKN di RS Sentra Medika Cikarang.

Willingness to Pay (kesediaan membayar) Iuran JKN merupakan kerelaan seseorang untuk membayar iuran JKN secara rutin tiap bulannya sejumlah Rp150,000 untuk kelas 1 atau Rp100,000 untuk kelas 2 dan Rp35,000 untuk kelas 3 sesuai dengan manfaat perawatan yang dipilih (Prakoso & Sudasman, 2020). *Willingness to pay* menentukan pilihan atau keikutsertaan orang tersebut untuk membayar suatu kondisi tertentu atau program maupun kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah (Suryani, 2017).

Sejalan dengan penelitian Prakoso, (2021) menyatakan bahwa pendapatan memiliki peran signifikan terhadap *willingness to pay* seseorang dalam membayar iuran JKN. Pendapatan meningkatkan kemungkinan untuk bersedia membayar premi secara rutin sebesar 2.02 kali lebih tinggi dibandingkan dengan

pekerja informal memiliki pendapatan rendah. Koefisien pendapatan yang positif sesuai dengan teori permintaan dalam ilmu ekonomi bahwa harus ada hubungan positif antara pendapatan dan WTP.

Mendukung penelitian ini, Hardika & Purwanti, (2020) menyatakan bahwa *willingness to pay* menentukan kelas iuran yang dipilih oleh peserta BPJS. Terbukti semenjak kebijakan kenaikan iuran BPJS menyebabkan masyarakat memindahkan atau menurunkan kelas perawatan yang lebih rendah karena biaya yang dibayarkan perbulannya akan menjadi lebih rendah. Per Januari tahun 2020 menunjukkan bahwa peserta yang pindah ke kelas yang lebih rendah sejumlah ± 800.000 . Mayoritas peserta BPJS memilih untuk pindah ke Kelas III atau kelas terendah. Sebanyak 96.735 peserta BPJS memutuskan turun dari kelas I ke Kelas II, sebanyak 188.088 peserta turun dari Kelas I ke Kelas III, dan selebihnya sebanyak 508.031 peserta turun dari Kelas II ke Kelas III.

Kemauan membayar seseorang memiliki kontribusi terhadap pemilihan kelas kepesertaan JKN. Sebanyak 74 responden mengalami tunggakan dalam membayar premi karena merasa keberatan untuk membayar iuran secara rutin dan tepat waktu. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka tidak terinformasi bagaimana cara mencicil tunggakan yang dimiliki saat ini oleh BPJS Kesehatan (Wahyuni & Widodo, 2021). Edukasi tentang hak dan kewajiban peserta perlu dilakukan secara konsisten oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan komitmen masyarakat dalam membayar iuran JKN.

Pemilihan kelas iuran JKN salah satunya ditentukan oleh *willingness to pay* seseorang. Pendapatan terbukti memiliki kontribusi yang besar terhadap kemauan seseorang untuk membayar iuran JKN secara rutin dan tepat waktu (Prakoso, 2021; Yandrizal et al., 2017). *Willingness to pay* seseorang juga dipengaruhi banyak hal. Kesadaran terhadap kesehatan, kerentanan penyakit, keseriusan penyakit, dan manfaat dari JKN merupakan beberapa faktor yang ikut

berkontribusi terhadap keputusan seseorang untuk memilih kelas kepesertaan JKN (Prakoso et al., 2020; Prakoso, 2021). Semakin tinggi *willingness to pay* seseorang akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk memilih kelas iuran yang lebih tinggi untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Simpulan

Terdapat hubungan antara kemampuan membayar dan kemauan membayar iuran peserta mandiri dengan penentuan iuran JKN di Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dan secara statistik signifikan. Hasil penelitian menunjukkan *ability to pay* peserta mandiri menunjukkan hubungan yang sedang dengan penentuan iuran JKN. Sedangkan *willingness to pay* peserta mandiri menunjukkan hubungan yang tinggi dengan penentuan iuran JKN.

Saran

Peneliti selanjutnya dapat melaksanakan penelitian serupa dengan subjek penelitian yang lebih heterogen atau menggunakan desain penelitian *mix method*.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Dedy, I. P., Hardy, K., Luh, N., Ari, G., & Yudha, N. (2019). Kemauan Dan Kemampuan Membayar (Ability - Willingness To Pay) Dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Sektor Informal Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Denpasar 2017 J . Kes-Terpadu – Oktober 2018. *Jurnal Kesehatan Terpadu*, 2(2), 96–100. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/541>
- Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2020). *Jumlah Peserta Aktif Dan Tidak Aktif (Menunggak Iuran) Ppu, Pbpu, Dan Bukan Pekerja (Bp)*. [Http://Sismonev.Djsn.Go.Id/Kepesertaan/?JumpTo=Tidakaktif_All](http://Sismonev.Djsn.Go.Id/Kepesertaan/?JumpTo=Tidakaktif_All)
- Hardika, C. P., & Purwanti, E. Y. (2020). Analisis Willingness To Pay Terhadap

- Iuran Bpjs Kesehatan Pada Pekerja Sektor Informal Di Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Economics*, 9(3), 131–143. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/31578>
- Hildayanti, A. N., Batara, A. S., & Alwi, M. K. (2021). Determinan Ability To Pay Dan Willingness To Pay Iuran Peserta Mandiri Bpjs Kesehatan Di Kecamatan Takabonerate (Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Selayar). *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 30–37. <https://doi.org/10.56338/pjkm.v11i1.1515>
- Muttaqien, M., Setiyaningsih, H., Aristianti, V., Selby Coleman, H. L., Hidayat, M. S., Dhanalvin, E., Siregar, D. R., Mukti, A. G., & Kok, M. O. (2021). Why Did Informal Sector Workers Stop Paying For Health Insurance In Indonesia? Exploring Enrollees' Ability And Willingness To Pay. *Plos One*, 16(6 June), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252708>
- Noerjoedianto, D. (2016). Kajian Ability To Pay (Atp) Bagi Calon Peserta Bpjs Kesehatan Dalam Pemilihan Besaran Iuran Di Propinsi Jambi Tahun 2015. *Jambi Medical Journal*, 4, 156–171. <https://doi.org/10.22437/jmj.v4i2.3580>
- Nur, R., Ab, I., S, D. L., Masyarakat, K., & Mulawarman, U. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kelas Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. 5(3), 135–141. <https://doi.org/10.33746/fhj.v5i3.32>
- Prakoso, A. D. (2021). Pengaruh Pendapatan , Pengetahuan Dan Kerentanan Penyakit Terhadap Willingness To Pay (Wtp) Premi Jaminan Kesehatan Pada Pekerja Sektor Informal. *Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 49–59. <https://doi.org/10.24903/kujkm.v7i1.1166>
- Prakoso, A. D., & Sudasman, F. H. (2020). Hubungan Antara Usia, Jenis Kelamin, Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Bukan Penerima Upah (Pbpu) Dengan Kesiadaan Membayar Iuran Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Kudus. *Journal Of Public Health Innovation*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.34305/jphi.v1i1.203>
- Prakoso, A. D., Sulaeman, E. S., & Suryono, A. (2020). Application Of Health Belief Model On Factors Affecting Participation In The National Health Insurance Scheme Among Informal Sector Workers In Kudus, Central Java. *Journal Of Health Policy And Management*, 5(1), 61–73. <https://doi.org/10.26911/thejhpm.2020.05.01.06>
- Siswoyo, B. E., Prabandari, Y. S., Hendartini, Y., Kebijakan, P., Kedokteran, F., & Mada, U. G. (2015). Kesadaran Pekerja Sektor Informal Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 04(04), 118–125. <https://doi.org/10.22146/jkki.v4i4.36116>
- Suryani, A. S. (2017). Persepsi Masyarakat Dan Analisis Willingness To Pay Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Public Perception And Willingness To Pay Analysed In Plastic Bag Paid Policy Study In Jakarta And Bandung. *Kajian*, 21(April 2012), 359–376. <https://10.0.86.196/kajian.v21i4.784>
- Wahyuni, N. W. A., & Widodo, S. (2021). Pelayanan Kesehatan, Pemilihan Kelas Perawatan Dan Sanksi Layanan Dengan Kemauan Membayar Premi (Willingness To Pay) Peserta Mandiri (Pbpu). *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(2), 163–171. <https://doi.org/10.15294/jppkmi.v2i2.52428>
- Yandrizal, Y., Rifa'i, R., & Utami, S. P. (2017). Analisis Kemampuan Dan Kemauan Membayar Iuran Terhadap Pencapaian Uhc Jkn Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*,

10(1),

3.

<https://doi.org/10.24893/jkma.v10i1.156>